



Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Tambrauw

Mariance Rieva¹, Baharuddin², Kristian Hoegh Pride Lambe³

^{1,2,3}) Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 28-02-2026 | Review 07-03-2026 | Revision 16-03-2026 | Accepted 25-03-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tambrauw. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur pengelola keuangan daerah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD RI telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan struktur, standardisasi, dan digitalisasi pengelolaan keuangan. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur jaringan, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya integrasi antar-organisasi perangkat daerah, serta proses adaptasi pengguna terhadap sistem yang masih berlangsung. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara desain normatif sistem dan realitas implementasi di daerah dengan keterbatasan geografis dan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah sebagai prasyarat peningkatan efektivitas SIPD RI dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Kata kunci: efektivitas, SIPD RI, pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Indonesian Regional Government Information System (SIPD RI) in regional financial management in Tambrauw Regency. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation involving local government officials responsible for financial management. Data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of SIPD RI has been carried out and has contributed to improving the structure, standardization, and digitalization of regional financial management. However, its effectiveness remains suboptimal due to limited internet infrastructure, insufficient human resource capacity, weak inter-agency integration, and ongoing user adaptation to the system. These results highlight a gap between the system's normative design and its empirical implementation, particularly in regions with geographical and technological constraints. This study recommends strengthening human resource capacity, enhancing information technology infrastructure, and improving coordination among regional agencies to optimize the effectiveness of SIPD RI in promoting transparent, accountable, and efficient financial governance.

¹E-mail: rieve_nebore@yahoo.com

²E-mail: dr_baharuddin05@gmail.com

³E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

Keywords: *effectiveness, SIPD RI, regional financial management, digital governance, human resource capacity.*

Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda strategis global dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Implementasi sistem informasi berbasis elektronik dalam manajemen keuangan publik terbukti mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat kontrol administratif terhadap penggunaan sumber daya (Agostino et al., 2022; Bernales-Vásquez & Sánchez-Dávila, 2025). Di Indonesia, transformasi ini diwujudkan melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai platform terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

SIPD RI dirancang untuk mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dalam satu sistem nasional yang terstandar (Sombo et al., 2025). Kebijakan ini sejalan dengan tuntutan regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi (Paembonan et al., 2024). Namun demikian, implementasi sistem ini di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Studi empiris menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi keuangan daerah mampu meningkatkan akurasi dan konsistensi data, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan (Lazuardi et al., 2024; Wurara et al., 2024).

Fenomena kesenjangan antara desain normatif dan realitas implementasi sistem digital pemerintah menjadi isu krusial, terutama di daerah dengan keterbatasan geografis dan infrastruktur. Kabupaten Tambrauw sebagai salah satu daerah dengan karakteristik wilayah terpencil menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi SIPD RI. Keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital aparatur, serta lemahnya integrasi antar-organisasi perangkat daerah menjadi faktor yang menghambat optimalisasi sistem. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kendala utama implementasi sistem informasi pemerintahan di daerah terletak pada aspek teknis dan sumber daya manusia (Fardiansah & Lestari, 2025).

Secara empiris, gangguan jaringan, keterbatasan operator yang kompeten, serta ketidaksinkronan data antar-perangkat daerah seringkali menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Mangallo et al., 2025; Pualillin et al., 2025). Padahal, ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan merupakan indikator utama akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah (Halik et al., 2024). Di sisi lain, penerapan SIPD RI juga menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem pendukungnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SIPD RI secara kontekstual di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, guna mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lapangan serta merumuskan strategi optimalisasi yang berbasis bukti empiris.

Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai kontribusi dalam pengembangan literatur e-government di konteks daerah tertinggal yang masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tambrauw?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SIPD RI?
3. Bagaimana strategi optimalisasi penerapan SIPD RI dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah?

Tinjauan Literatur

Efektivitas Sistem Informasi dalam Sektor Publik

Efektivitas merupakan konsep kunci dalam evaluasi implementasi kebijakan publik, yang merujuk pada tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks sistem informasi pemerintahan, efektivitas tidak hanya diukur dari keberfungsian teknis sistem, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan publik, akurasi data, serta efisiensi proses administrasi (DeLone & McLean, 2003; Petter et al., 2018). Model keberhasilan sistem informasi menekankan enam dimensi utama, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (net benefits) (Sanggalangi et al., 2025; Tampang et al., 2025). Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi dimensi tersebut menjadi faktor determinan dalam keberhasilan implementasi sistem digital di sektor publik (Alshboul, 2023).

Dalam praktiknya, efektivitas sistem informasi pemerintah seringkali menghadapi tantangan implementatif, terutama pada aspek adopsi pengguna dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan organisasi (Andoi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor teknologi, organisasi, dan manusia.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Sistem ini dirancang untuk mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan public (Sombo et al., 2025). Implementasi SIPD RI sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong digitalisasi proses administrasi pemerintahan (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Secara konseptual, SIPD RI mengadopsi pendekatan integratif yang menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu sistem berbasis teknologi informasi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah mampu meningkatkan konsistensi data dan mempercepat proses pelaporan, meskipun masih menghadapi kendala pada tahap implementasi di daerah tertentu (Pratama & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan SIPD RI sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam mengadopsi teknologi dan mengelola perubahan organisasi.

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah

Keberhasilan implementasi sistem informasi dalam sektor publik tidak dapat

dilepaskan dari beberapa faktor kunci, yaitu infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan. Infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet dan perangkat keras, menjadi prasyarat utama dalam operasionalisasi sistem berbasis digital (Susanto et al., 2021). Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sistem informasi tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor determinan dalam adopsi dan pemanfaatan sistem (Karangan et al., 2025). Aparatur yang memiliki literasi digital rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat penggunaan dan efektivitas sistem (Wahyuni et al., 2023). Faktor lainnya adalah koordinasi antar-organisasi perangkat daerah yang berperan dalam memastikan integrasi data dan sinkronisasi proses bisnis. Kegagalan koordinasi dapat menyebabkan fragmentasi data dan menurunkan kualitas informasi yang dihasilkan (Panggalo et al., 2025).

Kesenjangan Implementasi dalam Konteks Daerah Terpencil

Meskipun sistem informasi pemerintah dirancang secara nasional dengan standar yang seragam, implementasinya di daerah menunjukkan variasi yang signifikan. Daerah dengan keterbatasan geografis dan infrastruktur cenderung menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti keterbatasan akses internet, minimnya tenaga ahli, serta resistensi terhadap perubahan teknologi (Rahman & Putri, 2024). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara desain normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan one-size-fits-all dalam implementasi sistem informasi pemerintah kurang efektif jika tidak mempertimbangkan karakteristik lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi spesifik daerah dalam merancang strategi implementasi sistem informasi.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, efektivitas implementasi SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu:

1. **Dimensi teknologi:** kualitas sistem dan ketersediaan infrastruktur;
2. **Dimensi manusia:** kompetensi dan adaptasi pengguna;
3. **Dimensi organisasi:** koordinasi antar-perangkat daerah dan dukungan kelembagaan.

Ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dalam menentukan tingkat efektivitas sistem. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan integratif untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi implementasi SIPD RI secara empiris di Kabupaten Tambrauw (Armstrong & Taylor, 2026).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait efektivitas, kendala, dan dinamika implementasi di lapangan. Desain deskriptif

memungkinkan peneliti menggali realitas empiris secara komprehensif berdasarkan perspektif informan serta kondisi aktual organisasi (Patton, 2015).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw, yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan karakteristik wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan aksesibilitas geografis. Lokasi ini relevan untuk mengkaji implementasi SIPD RI dalam konteks daerah tertinggal. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Januari hingga Maret 2025, yang mencakup tahap pengumpulan data, observasi lapangan, serta verifikasi informasi.

Populasi, Informan, dan Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi tidak digunakan secara ketat seperti pada penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep informan penelitian yang dipilih berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah dan penggunaan SIPD RI, seperti pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), operator SIPD, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah **purposive sampling** (Memon et al., 2025), yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman, keterlibatan langsung dalam sistem, dan pemahaman terhadap proses pengelolaan keuangan daerah. Untuk memperkuat validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik **snowball sampling**, yaitu penambahan informan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation).

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama (Miles et al., 2021), yaitu:

1. **Wawancara mendalam (in-depth interview)**, dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, dan kendala dalam penggunaan SIPD RI.
2. **Observasi**, dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penggunaan sistem serta kondisi infrastruktur pendukung.
3. **Dokumentasi**, berupa pengumpulan dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, kebijakan terkait SIPD RI, serta arsip administratif lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. **Reduksi data**, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan;
2. **Penyajian data (data display)**, yaitu penyusunan informasi dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel untuk memudahkan pemahaman;
3. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi**, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan pola, hubungan, serta makna dari fenomena yang diteliti.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik **triangulasi sumber dan metode**, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan juga **member check** untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan maksud yang disampaikan oleh informan (Miles et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Tambrau merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki karakteristik geografis terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam akses teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggung jawab dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Secara struktural, implementasi SIPD RI di Kabupaten Tambrau telah mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala teknis dan non-teknis yang memengaruhi efektivitas sistem.

Karakteristik Informan Penelitian

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

No	Jabatan/Posisi	Jenis Kelamin	Lama Kerja	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Bidang Keuangan	Laki-laki	>10 tahun	S2
2	Operator SIPD	Laki-laki	5-10 tahun	S1
3	Staf Keuangan OPD	Perempuan	3-5 tahun	S1
4	Bendahara Pengeluaran	Perempuan	5-10 tahun	S1
5	Operator Perencanaan	Laki-laki	3-5 tahun	S1

Sumber: Data primer penelitian (2026)

Berdasarkan **Tabel 1**, responden penelitian didominasi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan sarjana dan pengalaman kerja yang cukup memadai. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, kapasitas sumber daya manusia relatif tersedia, namun tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi sistem..

Hasil Wawancara dan Temuan Empiris

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi SIPD RI telah memberikan manfaat dalam meningkatkan keteraturan administrasi keuangan. Salah satu informan menyatakan:

“Dengan SIPD, proses penganggaran jadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, tidak seperti sebelumnya yang masih manual.” (Informan 1)

Namun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur jaringan:

“Kendala terbesar kami itu jaringan internet, sering lambat bahkan tidak bisa diakses, sehingga pekerjaan jadi tertunda.” (Informan 2)

Selain itu, aspek kompetensi sumber daya manusia juga menjadi isu penting:

“Masih banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan SIPD, jadi sering terjadi kesalahan input data.” (Informan 3)

Temuan lainnya menunjukkan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah: “Kadang data dari OPD tidak sinkron, sehingga perlu dilakukan perbaikan berulang.” (Informan 4)

Analisis Tematik

Tabel 2. Hasil Analisis Tematik

Tema Utama	Subtema	Indikator Temuan
Efektivitas Sistem	Struktur dan Standardisasi	Proses lebih sistematis dan terdokumentasi
Infrastruktur Teknologi	Keterbatasan Jaringan	Akses lambat, sistem tidak stabil
Sumber Daya Manusia	Kompetensi dan Adaptasi	Kurangnya pemahaman teknis pengguna
Koordinasi Organisasi	Integrasi Antar OPD	Ketidaksinkronan data
Manfaat Sistem	Efisiensi dan Transparansi	Mempercepat pelaporan dan akses informasi

Sumber: Data primer diolah (2026)

Pembahasan

1. Efektivitas Implementasi SIPD RI dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Temuan menunjukkan bahwa SIPD RI meningkatkan standardisasi, keterlacakan (traceability), dan konsistensi data, namun efektivitas keseluruhan belum optimal. Secara kausal, peningkatan ini terjadi karena SIPD RI memaksa proses bisnis terstruktur (rule-based workflow) dan integrasi siklus keuangan dalam satu platform, sehingga mengurangi variasi prosedural antar-OPD. Ini konsisten dengan literatur e-government yang menyatakan bahwa standardisasi digital memperkuat kontrol administratif dan kualitas informasi (Agostino et al., 2022; Alshboul, 2023).

Namun, *net benefits* belum maksimal karena terjadi mismatch antara desain sistem (centralized, standardized) dan kapasitas lokal (infrastruktur dan SDM). Dalam kerangka *Information Systems Success Model*, kualitas sistem yang baik tidak otomatis menghasilkan manfaat jika use dan user competence rendah. Studi Lazuardi et al. (2024) dan Wurara et al. (2024) juga menemukan bahwa keberhasilan sistem keuangan daerah di Indonesia sangat bergantung pada *context readiness*.

Novelty penelitian ini terletak pada bukti empiris bahwa pada daerah terpencil, efektivitas lebih ditentukan oleh kesiapan ekosistem daripada kualitas sistem itu sendiri, sehingga pendekatan “one-size-fits-all” menjadi kurang relevan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SIPD RI

a. Infrastruktur Teknologi

Keterbatasan jaringan internet menjadi hambatan utama. Secara kausal, sistem berbasis web seperti SIPD RI memiliki ketergantungan tinggi pada konektivitas real-time, sehingga *latency* dan *downtime* langsung menurunkan produktivitas dan kualitas input data. Temuan ini sejalan dengan Susanto et al. (2021) yang menegaskan bahwa infrastruktur merupakan *enabling factor* utama dalam e-government.

b. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya literasi digital menyebabkan kesalahan input dan resistensi

penggunaan. Secara teoritis, ini dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM), di mana *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* memengaruhi adopsi. Ketika kompetensi rendah, persepsi kemudahan menurun, sehingga penggunaan tidak optimal (Wahyuni et al., 2023).

c. Koordinasi Organisasi

Ketidaksinkronan data antar-OPD menunjukkan lemahnya *inter-organizational integration*. Secara kausal, ini terjadi karena fragmentasi proses bisnis dan kurangnya *governance* lintas unit. Rahman & Putri (2024) menunjukkan bahwa kegagalan integrasi data sering berasal dari absennya mekanisme koordinasi formal dan standar interoperabilitas yang dipatuhi.

Novelty pada bagian ini adalah identifikasi bahwa hambatan tidak berdiri sendiri, tetapi bersifat sistemik dan saling memperkuat (*infrastructure-human-organization nexus*), yang jarang dijelaskan secara integratif dalam studi sebelumnya.

3. Strategi Optimalisasi Implementasi SIPD RI

Berdasarkan temuan, optimalisasi memerlukan pendekatan *multi-level intervention*:

1. Penguatan Infrastruktur

Investasi pada jaringan dan alternatif *offline-to-online synchronization* untuk daerah dengan konektivitas rendah. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan *real-time*.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan berbasis praktik (*hands-on training*) dan pendampingan berkelanjutan. Secara kausal, peningkatan kompetensi akan memperbaiki *perceived ease of use* dan meningkatkan tingkat adopsi.

3. Penguatan Tata Kelola dan Koordinasi

Pembentukan *data governance framework* lintas-OPD untuk memastikan konsistensi dan integrasi data.

Strategi ini sejalan dengan Pratama & Nugroho (2022), namun penelitian ini menambahkan bahwa efektivitas strategi sangat bergantung pada adaptasi kontekstual berbasis karakteristik wilayah.

Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi tidak cukup melalui pendekatan teknokratis, tetapi memerlukan *re-design* implementasi berbasis konteks lokal (*context-aware digital governance*).

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting baik secara praktis maupun teoritis dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi pemerintahan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Secara **praktis**, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD RI tidak dapat dilepaskan dari kesiapan infrastruktur digital sebagai fondasi utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan investasi pada infrastruktur teknologi informasi, khususnya dalam penyediaan jaringan internet yang stabil dan memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, sistem yang secara desain sudah baik tidak akan mampu berfungsi secara optimal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Program pelatihan yang bersifat berkelanjutan dan berbasis praktik menjadi lebih

relevan dibandingkan pelatihan sesaat, mengingat kompleksitas sistem yang terus berkembang. Di sisi lain, penguatan mekanisme koordinasi dan integrasi data antar-organisasi perangkat daerah juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Fragmentasi data yang terjadi akibat lemahnya koordinasi dapat mengurangi reliabilitas sistem secara keseluruhan. Lebih lanjut, pemerintah pusat diharapkan dapat mempertimbangkan fleksibilitas dalam desain dan implementasi sistem, khususnya bagi daerah dengan keterbatasan geografis dan infrastruktur, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Secara **teoritis**, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur sistem informasi dan e-government dengan menegaskan bahwa efektivitas implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh faktor kontekstual seperti kondisi geografis dan kapasitas lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif model keberhasilan sistem informasi dengan memasukkan variabel kontingensi yang selama ini cenderung kurang mendapat perhatian. Selain itu, temuan ini menguatkan pandangan bahwa implementasi e-government merupakan fenomena yang bersifat *socio-technical*, di mana interaksi antara aspek teknologi, manusia, dan organisasi menjadi penentu utama keberhasilan sistem. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menempatkan ketiga dimensi tersebut sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam menjelaskan keberhasilan implementasi sistem informasi, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tambrauw telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan struktur, standarisasi, dan transparansi proses administrasi keuangan. Namun demikian, tingkat efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya akses jaringan internet yang belum stabil, rendahnya kapasitas dan literasi digital sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi dan integrasi data antar-organisasi perangkat daerah. Ketiga faktor tersebut terbukti saling berinteraksi dan membentuk hambatan sistemik dalam implementasi SIPD RI. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi sistem memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan tata kelola organisasi. Dengan demikian, efektivitas SIPD RI dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain terbatasnya jumlah informan yang terlibat sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh perspektif organisasi, serta fokus penelitian yang hanya pada satu daerah sehingga generalisasi temuan menjadi terbatas. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan bergantung pada subjektivitas informan dan interpretasi peneliti. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna menguji hubungan antar-variabel secara lebih empiris, memperluas cakupan wilayah penelitian untuk memperoleh perbandingan antar-daerah, serta mengintegrasikan model teoritis seperti Technology Acceptance Model

(TAM) atau Technology-Organization-Environment (TOE) framework untuk memperkuat analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintah.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Kristian H.P. Lambe, S.T., M.Si selaku Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, serta masukan konstruktif yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah memberikan akses data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lema, M. D. (2022). New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery. *Public Money & Management*, 42(1), 69–72. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1890883>
- Alshboul, M. (2023). An investigation of factors affecting the success of e-government systems: A conceptual framework. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(1), 100150. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2022.100150>
- Andoi, H. S., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Efektivitas Strategi Pengelolaan Keuangan dalam Mendukung Penyusunan Program Kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 315–321. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1089>
- Armstrong, M., & Taylor, S. (2026). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (17th ed.). <https://www.koganpage.com/hr-learning-development/armstrong-s-handbook-of-human-resource-management-practice-9781398622081>
- Bernales-Vásquez, M., & Sánchez-Dávila, F. (2025). Digital transformation in public administration: Determinants and impacts on transparency and efficiency. *Government Information Quarterly*, 42(2), 101845. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101845>
- Fardiansah, R., & Lestari, D. (2025). Challenges in implementing government information systems in remote areas: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 15(1), 45–60.
- Halik, M. Y., Halik, J. B., Sumanti, D. A. F., & Mangampa, S. N. M. (2024). Auditor's Individual Morality In Moderating The Love Of Money And Machiavellian

- Characteristics Of Accounting Fraud Tendencies. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11), 2889–2903. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i11.p11>
- Karangan, M., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Program Kompetensi dan Pelatihan Karyawan terhadap Peningkatan Keselamatan Kerja di PT . Vale Indonesia Tbk. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 248–260. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/1031>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Lazuardi, I., Nugroho, R., & Setiawan, A. (2024). The effectiveness of regional financial information systems in improving public sector accountability. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 55–70.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Memon, M. A., Ramayah, T., Ting, H., & Cheah, J. (2025). PURPOSIVE SAMPLING : A REVIEW AND GUIDELINES FOR QUANTITATIVE RESEARCH. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 9(1), 1–23. [https://doi.org/10.47263/JASEM.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2021). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo : Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 70–78. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/992/824>
- Patton, M. . (2015). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. SAGE Publications Inc.
- Petter, S., DeLone, W., & McLean, E. (2018). Information systems success: The quest for the independent variables. *Journal of Management Information Systems*, 35(3), 795–831. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1480650>
- Pratama, A., & Nugroho, Y. (2022). Digital-based regional financial management: Implementation and challenges in Indonesian local governments. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 123–134.
- Pualillin, A. L., Pasae, Y., & Jaya, A. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Deiyai. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 382–387. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1099>
- Rahman, A., & Putri, S. (2024). E-government implementation in rural areas: Barriers and strategies. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(1), 89–102.
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan

- Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Sugiyono. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susanto, A., Suryanto, T., & Rahmawati, D. (2021). The role of ICT infrastructure in supporting e-government implementation. *Procedia Computer Science*, 197, 123–130. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.124>
- Tampang, G. I., Lambe, K. H. P., & Baharuddin, B. (2025). Pengaruh Pelatihan dan Pemanfaatan SIRUP terhadap Transparansi Pengadaan di Kabupaten Yahukimo. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 1–11. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/977>
- Wahyuni, S., Hidayat, R., & Prasetyo, B. (2023). Human resource readiness in adopting digital government systems. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 201–215.
- Wurara, F., Kalangi, L., & Runtu, T. (2024). Implementation of regional financial management information systems and their impact on financial reporting quality. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 15(1), 77–90.